

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 negara Jepang dan Korea Selatan mengalami sengketa antara keduanya. Awal mula terjadinya konflik perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan dikarenakan Jepang mengeluarkan kebijakan terkait dengan restriksi ekspor terhadap barang material kimia untuk pembuatan semikonduktor kepada negara Korea Selatan.<sup>1</sup> Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Jepang pada tahun 2019 oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan berdasarkan Pasal 25(1) dan Pasal 48(1) dalam Undang-Undang Pertukaran Asing dan Perdagangan Asing.<sup>2</sup> Kebijakan ini dikeluarkan oleh Jepang tanpa melakukan pemberitahuan kepada Korea Selatan.<sup>3</sup> Hal tersebut direspon oleh Korea Selatan dengan tindakan akan mengancam Jepang dikeluarkan dari *preferred trading partner* (memberikan akses istimewa ke produk-produk tertentu dari negara-negara yang berpartisipasi).<sup>4</sup> Tentu adanya hal ini akan memberikan kesulitan bagi Jepang dalam melakukan kegiatan ekspor ke Korea Selatan.

Tindakan yang dilakukan oleh Jepang ini sebagai bentuk respon dari keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan. Pada tahun

---

<sup>1</sup> Rafidhia Putri Hendarjat dan Arie Kusuma Paksi “Japanese Government Reasons Behind The Removal Of South Korea From Preferential Whitelist: A Mercantilism Perspective” *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Volume 14, No. 2, (Juli 2022).

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/6699>

<sup>2</sup> Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), “Update of METI's licensing policies and procedures on exports of controlled items to the Republic of Korea” 01 Juli 2019, diakses pada 10 Mei 2023 melalui [https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0701\\_001.html](https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0701_001.html)

<sup>3</sup> Firman Hidayat, dkk, *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dan Kerjasama Internasional – Konflik Perdagangan Makin Menakan Perekonomian Global Edisi III 2019* (Jakarta : Bank Sentral Indonesia, 2020) Hal. 114

<sup>4</sup> Firman Hidayat, dkk, *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dan Kerjasama Internasional – Konflik Perdagangan Makin Menakan Perekonomian Global Edisi III 2019*, Hal. 114

2018 Mahkamah Agung Korea Selatan untuk memutuskan menuntut beberapa perusahaan Jepang untuk membayar atas ganti rugi dari korban kerja paksa Jepang di masa lalu.<sup>5</sup> Namun Jepang menolak hal tersebut dengan alasan bahwa masalah terkait dengan tenaga kerja seharusnya sudah terselesaikan sejak tahun 1965 ketika Jepang dan Korea Selatan memulihkan hubungan diplomatik mereka. Sehingga hal ini memberikan perbedaan pandangan antara keduanya sehingga memunculkan konflik antara Jepang dan Korea Selatan. Adanya isu kerja paksa ini membuat Jepang bersikap tegas telah memicu ketegangan antara keduanya.<sup>6</sup> Kebijakan restriksi yang dilakukan oleh Jepang merupakan suatu bentuk dari balasan dari putusan pengadilan Korea Selatan sehingga Jepang pun melakukan pembatasan perdagangan.<sup>7</sup>

Sengketa perdagangan ini tentu akan memiliki dampak buruk kepada kedua negara yang akan merugikan mereka, apabila sengketa ini tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak. Bagi Jepang sendiri adanya sengketa ini akan berdampak terhadap kegiatan ekspor yang dilakukan Jepang kepada Korea Selatan. Dalam jangka pendek Jepang akan kehilangan ekspor terkait bahan material semikonduktor ke Korea Selatan karena adanya restriksi ekspor yang dilakukan oleh Jepang maka hal ini akan menurunkan pemasukan Jepang.<sup>8</sup> Berdasarkan data

---

<sup>5</sup> Kim Jaewon, "Seoul Court Orders Nippon Steel To Compensate Wartime Workers", *Nikkei Asia*, 30 Oktober 2018, diakses pada 25 Agustus 2023 melalui <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Seoul-court-orders-Nippon-Steel-to-compensate-wartime-workers>

<sup>6</sup> Prakash Panneerselvam, "Changing Dynamics of Regional Trade and Cooperation: A Case of Japan and South Korea", *Artha Journal of Social Sciences*, Vol. 19, No. 04 2020, diakses melalui <https://journals.christuniversity.in/index.php/artha/article/download/2814/1861/5301> diakses pada 20 Oktober 2023

<sup>7</sup> Yano Hideki, et al, "Japanese and Korean Perspectives on the Issue of Forced Labor in the Asia-Pacific War", *The Asia-Pacific Journal*, Vol. 21, No. 06 (2023) diakses melalui <https://apjjf.org/2023/10/Saaler-Yano-Kim.html> pada tanggal 30 Oktober 2023

<sup>8</sup> Firman Hidayat, et al, 2019, 114

pada tahun 2018 sampai 2019 rata-rata Korea Selatan dapat mengimpor sekitar \$33,6 juta per bulan bahan kimia semikonduktor dari Jepang.

**Tabel 1.1 : Jumlah impor Korea Selatan material semikonduktor dari Jepang (\$ juta)**

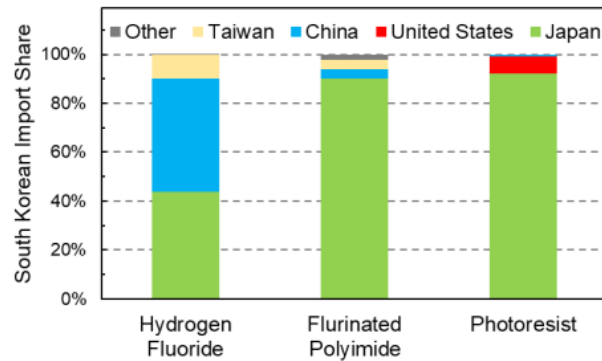
Import code	Tariff Line Description	Montly average	Quarterly average
2811111000	Hydrogen Flouride	\$5.3	\$15.9
3707901010	Photoresist	\$26.1	\$78.2
3911909000	Flourinated Polyimides- Powder	\$2.2	\$6.7
3920999010	Plymides Film, For Manufacturing Printed Circuit Board With The Function Of Lead Frame	\$2.2	\$6.7
	Total	\$33.6	\$100.7

Sumber : *The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply Chains*<sup>9</sup>

Adanya restriksi ini akan menghambat pemasokan bahan material semikonduktor ke Korea Selatan. Korea Selatan sebagai negara yang sangat bergantung kepada Jepang dalam pasokan bahan material semikonduktor. Negara Jepang merupakan salah satu impor terbesar dalam hal material semikonduktor. Dapat dilihat dalam gambar 1.1 bahwa Jepang merupakan negara yang paling banyak diimpor dalam hal material semikonduktor bagi Korea Selatan. Restriksi ini akan menjadi hambatan serius dalam pemasokan bahan material semikonduktor ke Korea Selatan, mengingat ketergantungan yang tinggi Korea Selatan pada Jepang dalam hal ini. Jepang merupakan salah satu pemasok terbesar bahan material semikonduktor bagi Korea Selatan, seperti terlihat dalam Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa Jepang mendominasi impor bahan material semikonduktor bagi negara tersebut.

<sup>9</sup> Samuel Goodman, etc, " The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply Chains" *Office of Industries, Working Paper ID-062* Okotober 2019, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3470271](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470271)

**Gambar 1.1 : Jumlah impor bahan material semikonduktor Korea Selatan dari negara lain.**



Sumber : *The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply Chains*<sup>10</sup>

Jepang menjelaskan bahwa tujuan dari adanya restriksi ekspor ini sebagai bentuk dari keamanan nasional mereka.<sup>11</sup> Selain itu, adanya kecurigaan Jepang terhadap Korea Selatan terkait penyalahgunaan bahan kimia. Jepang curiga terhadap Korea Selatan bahwa sebagian dari bahan kimia tersebut bocor ke Korea Utara dan digunakan untuk aplikasi militer di sana.<sup>12</sup> Namun, Korea Selatan dengan tegas membantah adanya perihal tersebut. Mereka menegaskan bahwa tidak ada bahan kimia yang disalahgunakan dan meminta PBB untuk menyelidiki klaim Jepang agar bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.<sup>13</sup>

Sejak tahun 2003, Jepang dan Korea Selatan melakukan inisiasi pembentukan JKFTA pendirian perjanjian dagang *Japan-Korea Free Trade Agreement* (JKFTA).<sup>14</sup> Dalam pendirian kerjasama ini kedua negara mencoba

<sup>10</sup> Samuel Goodman, etc, " The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply Chains" *Office of Industries*, Working Paper ID-062 Oktober 2019, hal. 04

<sup>11</sup> Jesika Althea, "Widhia Nugraha, Restriksi Perdagangan Internasional Atas Dasar National Security yang Dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan", *Jurist-Diction* Vol. 4 no. 1 (2021), diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/348384848\\_Restriksi\\_Perdagangan\\_Internasional\\_Atas\\_Dasar\\_National\\_Security\\_yang\\_Dilakukan\\_oleh\\_Jepang\\_terhadap\\_Korea\\_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/348384848_Restriksi_Perdagangan_Internasional_Atas_Dasar_National_Security_yang_Dilakukan_oleh_Jepang_terhadap_Korea_Selatan)

<sup>12</sup> Catherine Kim, "The escalating trade war between South Korea and Japan, explained" *VOX*, 09 Agustus 2019 diakses 25 Agustus 2023 <https://www.vox.com/world/2019/8/9/20758025/trade-war-south-korea-japan>

<sup>13</sup> Catherine Kim, "The escalating trade war between South Korea and Japan, explained" , 2019

<sup>14</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan-Korea Free Trade Agreement : Joint Study Group Report", 2003 diakses melalui <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/korea/fta/index.html>

untuk berdiskusi dan bernegosiasi atas pembentukan terkait perjanjian tersebut. Dalam negosiasi ini ada beberapa hal yang diperhatikan terutama terkait akan *non-tariff measures* (NTMs). Melalui JKFTA, bertujuan juga untuk menghapuskan hambatan berupa tarif dan non-tarif yang dapat mengganggu kerjasama perdagangan antara keduanya.<sup>15</sup>

Adanya respon dari Jepang terkait restriksi ekspor tentu melanggar perjanjian JKFTA karena Jepang menerapkan regulasi ekspor kepada Korea Selatan. Sehingga kegiatan ekspor akan terhambat. Adanya perjanjian tersebut seharusnya Jepang tidak mengeluarkan kebijakan restriksi ekspor yang dapat melanggar NTMs. Oleh karena itu melihat dari tindakan Jepang yang langsung menerapkan kebijakan restriksi ekspor tanpa melakukan pemberitahuan dan diskusi kepada Jepang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang respon Jepang terhadap tuntutan Mahkamah Agung Korea Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Jepang telah menerapkan restriksi ekspor terhadap bahan kimia yang digunakan dalam produksi semikonduktor ke Korea Selatan, yang telah memicu sengketa antara kedua negara. Restriksi ini terjadi atas keputusan Korea Selatan untuk menuntut perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada korban kerja paksa selama Perang Dunia II. Namun, Jepang menolak untuk membayar kompensasi tersebut karena Jepang merasa sudah menyelesaikan masalah tersebut pada tahun 1965. Restriksi yang dibuat oleh Jepang telah melanggar perjanjian perdagangan Korea Selatan dalam *Japan-Korea Free Trade*

---

<sup>15</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan-Korea Free Trade Agreementt : Joint Study Group Report", 2003

*Agreement*. Sehingga peneliti tertarik meneliti apa yang mempengaruhi respon Jepang dalam memanggapi tuntutan yang diberikan oleh Korea Selatan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah “Apa yang mempengaruhi respon Jepang dalam menanggapi tuntutan kompensasi kerja paksa oleh Mahkamah Agung Korea Selatan?”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang mempengaruhi respon Jepang dalam menanggapi tuntutan Mahkamah Agung Korea Selatan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Bagi penulis adanya penelitian bertujuan untuk menambah pemahaman terkait isu sengketa perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan terkait akan pembatasan ekspor bahan material semikonduktor. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi bagi pembaca dalam bagaimana negara dalam merespon suatu kebijakan dari negara lain.

#### **b. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan dengan bijak agar tidak berdampak buruk pada hubungan diplomatik mereka dengan negara lain.

### **1.6 Studi Pustaka**

Ada beberapa kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai sumber kerangka berpikir dalam menjelaskan studi kasus sengketa perdagangan antara Jepang dan

Korea Selatan. Berikut beberapa kajian pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Literatur pertama artikel jurnal berjudul “Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor Ke Korea Selatan” yang ditulis oleh Lukluk Nurbaiti.<sup>16</sup> Dalam literatur ini menjelaskan kepentingan yang dilakukan oleh Jepang dalam melakukan pembatasan ekspor material semikonduktor kepada Korea Selatan dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Dalam literatur ini dijelaskan bahwa ada faktor eksternal dan internal mengapa Jepang melakukan pembatasan ekspor ini. Faktor internal ini dipengaruhi adanya keamanan nasional dan produktivitas terkait material semikonduktor tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal adanya keputusan dari Korea Selatan terkait akan ganti rugi kerja paksa kepada perusahaan Jepang.

Adanya literatur ini berkontribusi bagi penulis untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Jepang dalam melakukan pembatasan ekspor kepada Korea Selatan, yang membedakan dari penelitian peneliti terdahulu pada konsep yang digunakan yaitu kebijakan luar negeri.

Literatur kedua yaitu artikel berjudul “Export restrictions in the Japan-China-U.S. Trilateral relationship” yang ditulis oleh Tomoo Marukawa.<sup>17</sup> Dalam literatur ini menjelaskan upaya oleh pemerintahan Trump untuk menerapkan pembatasan ekspor terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, hal ini merupakan bentuk "Perang Ekonomi Barat" yang telah diterapkan sejak zaman

---

<sup>16</sup> Lukluk Nurbaiti, “Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor Ke Korea Selatan” *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi I (Januari-Juni 2021), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/29958>

<sup>17</sup> Tomoo Marukawa, “Export restrictions in the Japan-China-U.S. Trilateral relationship” *The Japanese Political Economy*, 1-24 (2020) <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2329194X.2020.1836498>

Perang Dingin terhadap blok Komunis. Namun, keadaan ekonomi dan keterlibatan Tiongkok dalam ekonomi dunia saat ini berbeda secara signifikan dari situasi pada masa Perang Dingin.

Pertama, Tiongkok secara ekonomi lebih kuat daripada lawan-lawan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Hal ini menyebabkan efektivitas pembatasan ekspor menjadi lebih rendah karena Tiongkok memiliki sumber daya dan cadangan ekonomi yang lebih besar, dan dapat mencari alternatif dari sumber-sumber lain jika menghadapi embargo dari AS dan beberapa sekutunya. Kedua, Tiongkok saat ini jauh lebih terintegrasi dalam ekonomi dunia daripada blok Soviet pada masa Perang Dingin. Tiongkok menjadi mitra dagang yang penting bagi banyak negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, upaya untuk menyingkirkan Tiongkok dari jaringan perdagangan global akan memiliki dampak negatif yang serius bagi industri-industri Jepang dan Amerika Serikat. Perbedaan dengan literatur ini dengan penelitian penulis adalah terkait studi kasus yang dipilih literatur ini memilih studi kasus Jepang dan Amerika Serikat. Literatur ini berkontribusi bagi peneliti untuk melihat pembatasan ekspor negara yang mana dalam jurnal ini menjelaskan terkait pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang kepada Tiongkok.

Literatur ketiga, artikel jurnal berjudul “Negotiating national identities in conflict situations: The discursive reproduction of the Sino-US trade war in China’s news reports”, yang ditulis oleh Hong Wang and Yunfeng Ge.<sup>18</sup> Dalam artikel jurnal ini menjelaskan bahwa identitas ini dipengaruhi oleh ideologi, tercermin

---

<sup>18</sup> Hong Wang and Yunfeng Ge, “Negotiating national identities in conflict situations: The discursive reproduction of the Sino-US trade war in China’s news reports” *Discourse & Communication* 1–19 (2019), <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1750481319893406>



dalam hubungan internasional, dan akhirnya dibangun melalui strategi. Dalam hal ini ada yang diungkap penulis yaitu empat identitas utama yang dibangun Tiongkok sebagai korban perang dagang, pembela perdagangan bebas, penggerak negosiasi, dan penerima kerjasama saling menguntungkan. Selain itu, adanya hal ini menimbulkan hubungan yang kompleks dengan Amerika Serikat yang menciptakan tiga hubungan : hubungan antagonis, negosiatif, dan kerjasama.

Hubungan ini berkaitan dengan dua identitas nasional Tiongkok: sebagai korban perang dagang dan pembela perdagangan bebas. Penulis menggunakan strategi destruktif untuk menggambarkan Tiongkok sebagai terpinggirkan dan terancam oleh Amerika Serikat, yang merangsang patriotisme dan melegitimasi tindakan balasan Tiongkok. Strategi pembenaran mengutuk Amerika Serikat karena melanggar aturan perdagangan bebas dan mengesahkan tindakan Tiongkok, yang menggambarkan Tiongkok sebagai pembela perdagangan bebas yang tidak hanya berjuang demi kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan dunia.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak bagaimana konflik dapat terjadi karena adanya pengaruh internal negara yaitu berupa ideologi dari negara tersebut. Literatur ini berguna bagi penulis untuk melihat bagaimana adanya identitas negara juga berpengaruh terhadap ideologi dari suatu negara dalam studi kasus ini Tiongkok. Identitas ini juga secara langsung akan berdampak pada hubungan internasional dengan negara lain, dalam studi kasus ini hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Literatur keempat, artikel jurnal berjudul “History and Japanese South Korea Trade Wars” yang ditulis oleh Fahrizal Nugroho dan M. Mossadeq Bahri. Dalam artikel ini menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri, ada beberapa

faktor yang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam kasus perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sejarah dan pandangan publik. Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah sejarah yang belum terselesaikan, terutama sehubungan dengan kompensasi pekerja paksa Korea Selatan di era Perang Dunia 2. Opini publik di Korea Selatan tentang kejahatan masa lalu Jepang juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun ada faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan antara kedua negara, seperti perang dagang, tetapi faktor internal seperti sejarah dan opini publiklah yang paling dominan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang.

Perbedaannya dengan penelitian penulis literatur ini menggunakan konsep *desicion making of foreign policy* dalam menganalisisnya. Literatur ini berkontribusi bagi penulis untuk melihat faktor-faktor yang mendorong negara dalam membuat kebijakan hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang yang dipengaruhi oleh sejarah yang belum terselesaikan.

Literatur kelima, artikel jurnal berjudul, “Trade Disagreement Between Japan and South Korea” yang ditulis oleh Yiquan Wang.<sup>19</sup> Dalam artikel jurnal ini menjelaskan tentang perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan semakin meruncing dari hari ke hari. Beberapa ahli menyalahkan perselisihan ini pada kebijakan Amerika Serikat, sementara yang lain melihatnya sebagai persaingan antara kedua negara untuk menjadi yang terkuat di kawasan Asia. Konflik ini muncul karena kedua negara saling memberlakukan pembatasan perdagangan dan

---

<sup>19</sup> Yiquan Wang, “Trade Disagreement Between Japan and South Korea”, *Asian Business Research*, Vol. 4, No. 3, 2019 diakses melalui <http://journal.julypress.com/index.php/abr/article/download/685/504>

embargo dengan tujuan untuk mencapai dominasi. Selain itu, Jepang dan Korea Selatan juga bersaing dalam hal inovasi, khususnya terkait penentuan negara mana yang harus menyuplai material tertentu ke Amerika Serikat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa ketegangan saat ini berasal dari ketidakpuasan atas penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada periode sebelum Perang Dunia II. Korea Selatan menekankan bahwa Jepang harus meminta maaf atas pemaksaan banyak wanita Korea menjadi budak bagi tentara Jepang.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada arah penelitian pada literatur ini melihat adanya keterlibatan dengan negara pihak ketiga terhadap konflik negara lain. Literatur ini berguna bagi peneliti untuk melihat ada aktor lain yang menyebabkan perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan yaitu keterlibatan Amerika Serikat.

**Tabel 1.2 Studi Pustaka**

Nama	Judul Penelitian	Kerangka Konsep	Hasil Penelitian
Lukluk Nurbaiti	<i>Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor Ke Korea Selatan</i>	Foreign Policy	Ada faktor eksternal dan internal mengapa Jepang melakukan pembatasan ekspor ini. Faktor internal ini dipengaruhi adanya keamanan nasional dan produktivitas terkait material semikonduktor tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal adanya keputusan dari Korea Selatan terkait akan ganti rugi kerja paksa kepada perusahaan Jepang.
Tomoo Marukawa	<i>Export restrictions in the Japan-China-U.S. Trilateral relationship</i>	Analytical Framework of Export Restrictions by Adler-Karlsson	Adanya penerepan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok merupakan sebuah bentuk dari Perang Ekonomi Barat yang telah diterapkan sejak Perang Dingin. Namun hal ini sudah tidak seperti dulu dimana Tiongkok sudah menjadi negara yang kuat dalam segi ekonomi.

Hong Wang dan Yunfeng Ge	<i>Negotiating national identities in conflict situations: The discursive reproduction of the Sino-US trade war in China's news reports</i>	Socio-cognitive perspective of critical discourse analysis	Dalam lieteratur ini menjelaskan bagaimana konflik perdagangan dapat terjadi akibat dari identitas. Identitas dipengaruhi oleh ideologi, tercermin dalam hubungan internasional, dan akhirnya dibangun melalui strategi.
Fahrizal Nugroho dan M. Mossadeq Bahri	<i>History and Japanese South Korea Trade Wars</i>	Desicion Making of Foreign Policy	Dalam kasus perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang, pengaruh utamanya adalah sejarah dan pandangan publik. Konflik ini sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah sejarah yang belum terselesaikan, terutama sehubungan dengan kompensasi pekerja paksa Korea Selatan di era Perang Dunia II
Yiquan Wang	<i>Trade Disagreement Between Japan and South Korea</i>	Realism and Liberalism	Adanya perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan juga dipengaruhi adanya pihak ketiga yaitu Amerika Serikat

Sumber : Disusun Oleh Peneliti

## 1.7 Kerangka Konsep

### 1.7.1 *Disproportionality*

*Disproportionality* menurut Kayce Marie Mobley dalam bukunya berjudul “*Revenge, Proportionality, And International Relations*” adalah konsep yang menjelaskan respon atau tindakan yang dianggap tidak seimbang atau berlebihan dengan situasi atau peristiwa yang memicu respon tersebut. Dalam konteks konflik dan hubungan internasional, istilah ini mengacu pada respon yang tidak sebanding atau berlebihan dengan tindakan yang diterima. Dalam norma konflik biasanya respon yang diharapkan adalah *proportionality*, artinya tanggapan atau tindakan yang diambil sebanding dengan peristiwa atau suatu tindakan yang dihadapi.<sup>20</sup> *Proportionality* mengacu pada gagasan bahwa respon terhadap tindakan tertentu

<sup>20</sup> Kayce Marie Mobley, *Revenge, Proportionality, And International Relations*, (Athens : The University of Georgia, 2015) Hal.18

harus sebanding dan tidak berlebihan dalam menanggapi tindakan tersebut. Sebagai contoh pada tahun 1998, Amerika Serikat merespon serangan terhadap kedutaannya di Kenya dan Tanzania dengan melakukan serangan udara terbatas terhadap kamp-kamp teroris di Afghanistan dan Sudan, yang dianggap sebagai respon yang proporsional. <sup>21</sup>Hal tersebut menunjukkan bahwa Amerika hanya menargetkan kepada teroris yang terlibat tanpa melibatkan intitusi manapun yang berkaitan dengan Afghanistan dan Sudan.

Respon yang proporsional atau sebanding ketika negara mengkomunikasikan tujuan dan pesan yang jelas. Dengan merespon secara proporsional, negara-negara dapat dengan jelas menyampaikan niat dan motivasi mereka dan tidak menyebabkan konflik yang semakin meningkat. Respon yang proporsional membantu mencegah reaksi berlebihan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional. Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan dan mengatasi ketidakpuasan tanpa mengeskalasikan konflik secara tidak perlu.<sup>22</sup>

Sebaliknya *disproportionality* adalah sebagai sebuah respon yang tidak sesuai atau berlebihan. *Disproportionality* merujuk pada ketidaksesuaian antara tindakan atau respon yang diberikan negara terhadap suatu tindakan negara lain. Hal ini dapat dicontohkan pada peristiwa invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Pemicu untuk invasi ini adalah keyakinan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massa. Invasi ini dilakukan oleh Amerika Serikat atas penolakan Irak menolak untuk melaporkan tentang pengembangan senjata mereka.

---

<sup>21</sup> Kayce Marie Mobley, *Revenge, Proportionality, And International Relations*, (Athens : The University of Georgia, 2015) Hal.48

<sup>22</sup> Kayce Marie Mobley, *Revenge, Proportionality, And International Relations*, (Athens : The University of Georgia, 2015) Hal.47

Hal ini pun dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dengan menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massa dan mereka pun melakukan invasi ke Irak. Hal ini merupakan tindakan yang disproportional karena respon yang diberikan oleh Amerika atas penolakan Irak tidak sesuai karena mereka langsung menginvasi Irak. Amerika Serikat pun meyakini bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massa hingga menggulingkan rezim saat itu.

Respon yang tidak proporsional dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pelanggaran hukum internasional, pelanggaran perjanjian, persepsi akan adanya ancaman, rasa takut, dan balas dendam. Faktor-faktor ini dapat membuat negara mengabaikan norma-norma sosial, bertindak sesuai kepentingan dirinya sendiri, dan merespon dengan kekuatan atau tindakan yang berlebihan. *Disproportionality* juga didasari atas perspektif realis mencoba untuk menggambarkan respons yang tidak proporsional sebagai upaya strategis untuk menakut-nakuti pihak lain agar tidak menyerang di masa depan. Misalnya, dengan menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap suatu krisis, sebuah negara mungkin berharap dapat mencegah serangan yang lebih lanjut. Untuk memahami konsep *disproportionality* menurut Kayce ada tiga kategori utama dalam menjelaskan respon yang *disproportionality* *Systemic explanation, dyadic explanation, dan domestic political explanation.*<sup>23</sup> Dalam masing-masing kategori penjelasan ini, akan dibagi menjadi dua pandangan yaitu *overreaction as strategic behavior* dan *overreaction as reckless behavior*, berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kategori:

---

<sup>23</sup> Kayce Marie Mobley, *Revenge, Proportionality, And International Relations*, hal. 18-32

## 1. *Systemic Explanations*

*Systemic Explanations* ini mengacu pada pandangan bahwa tindakan respon yang tidak proporsional dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan dinamika dan *balance of power* antara negara-negara di sistem internasional. Dalam konteks ini, beberapa elemen yang terkait dengan *balance of power*, seperti kekuatan militer, aliansi, dan ekonomi dapat mempengaruhi cara negara merespon terhadap situasi tertentu.<sup>24</sup>

### a. *Overreaction as Strategic Behavior*

Pandangan ini menjelaskan bahwa respon yang *disproportionality* tersebut mungkin menjadi bagian dari strategi yang disengaja untuk menegaskan kekuatan mereka kepada negara lain. Respon yang tidak proporsional dapat dianggap sebagai bagian dari strategi yang disengaja menyoroti bahwa negara yang merespon secara berlebihan mungkin sengaja ingin melakukannya dengan tujuan tertentu.

### b. *Overreaction as reckless behavior*

Pandangan ini menjelaskan bahwa adanya reaksi atau respon *disproportionality* dalam perilaku negara adalah hal yang umum dalam hubungan internasional. Penjelasan ini juga berpendapat bahwa adanya tindakan yang berlebihan diakui sebagai sebuah tindakan yang sering terjadi pada negara. Negara dapat terjebak dalam reaksi impulsif atau tidak terukur ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Hal ini terjadi karena pandangan ini menganggap negara bertindak secara ceroboh dan seringkali tidak rasional.

---

<sup>24</sup> Randall L. Schweller, "The Balance of Power in World Politics", *Politics*, Mei 2016, [https://www.researchgate.net/publication/306091384\\_The\\_Balance\\_of\\_Power\\_in\\_World\\_Politics](https://www.researchgate.net/publication/306091384_The_Balance_of_Power_in_World_Politics) diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

## 2. *Dyadic Explanations*

*Dyadic Explanations* yaitu menjelaskan bagaimana reaksi berlebihan dari negara-negara dalam pasangan konflik dengan mempertimbangkan karakteristik strategis kedua negara melibatkan analisis terperinci tentang bagaimana setiap negara bereaksi terhadap tindakan yang diambil oleh negara mitra konfliknya.

### a. *Overreaction as Strategic Behavior*

Pandangan ini menjelaskan respons yang tidak proporsional dapat menjadi strategis jika seorang pihak ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat. Dengan merespon secara tidak proporsional, negara tersebut berusaha menunjukkan ketegangan, keputusan, atau ketidakpuasan yang sangat mendalam terhadap situasi tertentu. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk diplomasi atau strategi komunikasi yang menggunakan kekuatan atau respon yang berlebihan untuk menyampaikan niat atau sikap yang kuat.

### b. *Overreaction as reckless behavior*

Pandangan ini menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan internasional, persaingan atau rivalitas yang menjadi dasar dari tindakan diproporsional hal ini sebagai rivalitas, di mana konflik terus menerus terjadi sehingga pengambilan keputusan dipengaruhi oleh sikap negatif dari sejarah bersama, yang dapat meningkatkan kemungkinan eskalasi konflik. Rivalitas semacam itu mungkin membuat kedua negara lebih rentan terhadap reaksi yang tidak proporsional karena adanya ketegangan dan sikap negatif yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu.. Sehingga pengambilan keputusan oleh kedua negara lebih sering dipengaruhi oleh sikap negatif mereka antara satu sama lain tanpa mempertimbangkan pengambilan keputusan yang strategis atau rasional.



### 3. *Domestic Politics Explanations*

Penjelasan ini memfokuskan pada pengaruh politik domestik terhadap perilaku negara dalam situasi yang mengharuskan mereka bertindak *disproportionality*. Faktor-faktor seperti tekanan dari kelompok-kelompok dalam negeri, agenda politik dalam negeri, atau respon terhadap opini publik dalam negeri dapat memengaruhi reaksi negara.

#### 1. *Overreaction as Strategic Behavior*

Pandangan ini menjelaskan bahwa respon yang *disproportionality* dipengaruhi politik domestik yaitu dipengaruhi oleh opini publik didalam negara tersebut. Adanya tekanan dari masyarakat domestik bisa mempengaruhi pemimpin negara dalam bertindak *disproportionality*. Hal ini dapat dijelaskan ketika publik melihat bagaimana pemimpin mereka menghapi suatu krisis atau peristiwa yang sedang terjadi. Publik juga akan melihat bagaimana komitmen pemimpin mereka dalam menghadapi suatu krisis atau peristiwa yang sedang dihadapi.

#### 2. *Overreaction as reckless behavior*

Pandangan ini menjelaskan bahwa negara melakukan tindakan yang *disproportionality* menyoroti adanya pengaruh kelompok kepentingan untuk pengembangan industri dalam negeri dengan membenarkan ekspansi yang berlebihan. Sehingga adanya hal-hal tersebut dapat membuat negara dapat berperilaku yang cenderung untuk mengejar kebijakan yang terlalu agresif sehingga hal ini dapat menyebabkan tindakan mereka bagi negara merupakan tindakan yang disproporsional.

. Dalam konsep *disproportionality*, akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi respon Jepang ini sebagai respon yang *disproportionality* atau tidak

proporsional dalam menanggapi tindakan dari Mahkamah Agung Korea Selatan. Tindakan yang dilakukan Mahkamah Agung Korea Selatan merupakan keputusan untuk menuntut beberapa perusahaan Jepang untuk membayar atas ganti rugi dari korban kerja paksa Jepang di masa lalu. Dalam konsep *disproportionality*, respon yang dilakukan Jepang dianggap sebagai tindakan yang *disproportionality*. Hal ini dikarenakan Jepang langsung memutuskan melakukan restriksi kepada Korea Selatan tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Korea Selatan terkait dengan penolakan mereka untuk membayar tuntutan tersebut. Tindakan Jepang ini juga melanggar perjanjian perdagangan Jepang dan Korea Selatan dalam *Japan-Korea Free Trade Agreement*.

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya mendeskripsikan dan menganalisis suatu penelitian. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data berupa data deskriptif dimana hal ini dihasilkan dari hasil pengamatan.<sup>25</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam perilaku, tindakan, dan interaksi manusia, serta bagaimana konteks sosial mempengaruhi fenomena tersebut. Salah satu ciri utama dari penelitian kualitatif adalah pendekatannya yang bersifat induktif. Ini berarti peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, analisis dokumen, atau teknik pengumpulan data lainnya, kemudian data tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola,

---

<sup>25</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif : Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, April 2020) Hal. 19

tema, dan makna yang muncul dari data.<sup>26</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah sosial dan manusia. Pendekatan ini tidak hanya menggali fakta dan informasi, tetapi juga mencoba untuk mengungkap makna, persepsi, dan pengalaman yang ada di balik fenomena sosial.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci tentang suatu isu atau fenomena sosial dengan dilandasi teori. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan respon Jepang terhadap tuntutan kompensasi kerja paksa oleh mahkamah agung Korea Selatan.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti membatasi penelitian pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Tahun 2018 merupakan awal mula tuntutan Korea Selatan kepada Jepang terkait ganti rugi korban paksa Jepang pada Perang Dunia II. Sedangkan tahun 2022 terkait akan eskalasi konflik antara kedua negara yakni Jepang dan Korea Selatan.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Istilah unit analisis merujuk kepada subjek atau obyek yang menjadi fokus penelitian. Konsep ini juga mencakup apa yang akan diteliti, apa yang akan dijelaskan, dan aspek apa yang akan dikaji dalam penelitian. unit analisis dapat

---

<sup>26</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif : Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, 2020, Hal. 21-24

berupa opsi, keputusan, perilaku, dan hasil dari suatu situasi. Dengan kata lain, ini merujuk pada elemen-elemen yang menjadi pusat perhatian dalam analisis politik internasional.<sup>27</sup> Unit eksplanasi merujuk kepada unsur atau faktor yang digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis suatu fenomena atau kejadian dalam konteks studi atau penelitian. Dalam konteks politik internasional, unit eksplanasi bisa berupa konsep, variabel, teori, atau aspek lain yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah respon Jepang, sedangkan untuk unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah tuntutan kompensasi kerja paksa oleh Mahkamah Agung Korea Selatan. Untuk level analisis dalam penelitian ini menggunakan level analisis negara, karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis respon Jepang terhadap tuntutan kompensasi kerja paksa oleh Mahkamah Agung Korea Selatan.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang mengambil dari sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, berita, dan website resmi. Dalam penelitian peneliti menggunakan beberapa buku Eko Murdiyanto dengan judul *Penelitian Kualitatif : Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal, Kajian Kebijakan Politik Internasional Metode, Teori Dan Studi Kasus*, yang ditulis oleh Renny Puspitarini, “*Revenge, Proportionality, And International Relations*” karya Kayce Marie Mobley, “*Global Supply Chains: Trade And Economic Policies For Developing Countries*”, karya Nicita,

---

<sup>27</sup> Renny Puspitarini, *Kajian Kebijakan Politik Internasional Metode, Teori Dan Studi Kasus*, (Jakarta : Jakad Media Publishing, 2020). hal. 19

<sup>28</sup> Renny Puspitarini, *Kajian Kebijakan Politik Internasional Metode, Teori Dan Studi Kasus*, (Suarabaya : Jakad Media Publishing, 2020), hal. 31

Alessandro, Victor Ognivtsev, dan Miho Shirotori, dan *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional - Edisi III 2019* ditulis oleh Firman Hidayat dan Diah Indiral.

Peneliti juga menggunakan beberapa artikel jurnal yang memenuhi informasi terkait akan motif Jepang melakukan restriksi ekspor terkait bahan material semikonduktor ke Korea Selatan, melalui berbagai sumber seperti *The Japanese Political Econom*, *JSTOR*, *SAGE*, *JOM Fisip*, *Reserchgate*, dan *Social Science Research Network*. Selain itu, menggunakan beberapa sumber berita seperti *The Diplomat*, *Asian Forum*, *Vox*, *Reuters*, *Hankyoreh HANI.CO.KR*. serta juga menggunakan website resmi pemerintah Jepang yaitu [www.mofa.go.jp](http://www.mofa.go.jp).

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan hal yang dilakukan peneliti untuk mengatur, mengelompokan, dan menyusun data secara sistematis dimana hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyampaikan hasil penelitiannya.<sup>29</sup> Adapun prosedur dalam analisis data meliputi langkah-langkah seperti, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah suatu penyempurnaan data, hal ini dilakukan dengan cara mengurangi atau menambahkan data. Pengurangan data dilakukan untuk tidak memasukan data yang tidak relevan dengan apa yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan penelitian agar mudah untuk dipahami.

---

<sup>29</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), Hal. 75

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses untuk mengumpulkan data yang akan kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan apa yang diperlukan penulis. Tujuan dari adanya penyajian data ini untuk menyusun dan menggabungkan berbagai informasi untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti. Selain itu, penyajian data berguna untuk peneliti tidak kesulitan dalam menguasai berbagai informasi yang ada.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses untuk merumuskan hasil dari penelitian yang disajikan dengan singkat dan padat serta mudah untuk dipahami.

### 1.9 Sistematika Penulisan

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan penelitian ini berisikan latarbelakng, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan literatur yang relevan. Selain itu, dijelaskan juga kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Konflik Jepang Dan Korea Selatan**

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana sejarah hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan baik itu dalam hal hubungan ekonomi maupun hubungan politik serta menjelaskan tentang dinamika yang terjadi dalam hubungan kedua negara tersebut

### **BAB III Tuntutan Korea Selatan Kepada Jepang Mengenai Kompensasi Kerja Paksa Pada Masa Perang Dunia II**

Pada bagian ini akan menjelaskan kebijakan Jepang melakukan restriksi ekspor bahan material semikonduktor ke Korea Selatan. Selain itu juga akan menjelaskan alasan dari Jepang melakukan restriksi ekspor ini.

### **BAB IV Analisis Respon Jepang Terhadap Tuntutan Kompensasi Kerja Paksa oleh Mahkamah Agung Korea Selatan**

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil temuan dari bab dua dan bab tiga, dimana hasil temuan tersebut akan dianalisis menggunakan konsep *Disproportionality* oleh Kayce Marie Mobley dalam bukunya berjudul “*Revenge, Proportionality, And International Relations*”

### **BAB V Penutup**

Pada bagian ini akan berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan juga berisikan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

